



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai selaku Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 2017 yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 merupakan wujud tindak lanjut agar terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan sesuai Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 disebutkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/alternatif, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran;

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2017. Dengan demikian, Perubahan Renja mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib daerah
4. Merupakan penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun perubahan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 dengan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- b. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

#### **BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD**

- 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2017

#### **BAB IV : PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan II**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat 7 program dan 50 kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, adm keuda, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) Program dengan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan dan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.606.750.000,00- (dua miliar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.438.870.396,00- (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 93,92% dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 312.067.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.132.098.193,00 atau sebesar 42%. *Outcome* dari program ini adalah Cakupan layanan administrasi yang tertangani, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.685.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.685.000,- atau sebesar 55%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah Pengiriman surat-surat dinas dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta penyediaan 4 orang tenaga kontrak selama lima bulan.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 603.793,- atau sebesar 20%. Adapun *output* dari kegiatan ini



adalah pembayaran 3 rekening/tagihan alat komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk lima bulan.

- c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.075.000,- atau sebesar 69%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pemeliharaan AC, Laptop, Mesin Fotocopy dan Printer.
- d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.600.000,- atau sebesar 100%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah penyediaan 11 jenis barang cetakan dan penggandaan surat dinas untuk satu tahun.
- e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.250.000,- atau sebesar 23%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah penyediaan 120 jenis surat kabar perbulan selama lima bulan.
- f) Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.960.000,- atau sebesar 67%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan perkantoran selama lima bulan.
- g) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.924.400,- atau sebesar 32%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah selama lima bulan.
- h) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar 32%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah Pembayaran honorarium 2 (dua) orang tenaga administrasi teknis untuk lima bulan.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 168.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.795.000,00 atau sebesar 27 %. Adapun *outcome*



program ini adalah Persentase sarana prasarana aparatur yang tersedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 168.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.795.000,- atau sebesar 27%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas operasional R4 secara rutin/berkala untuk lima bulan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 317.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.120.000,00 atau sebesar 10%. *Outcome* dari program ini adalah Persentase pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelatihan jabatan fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 84.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.120.000,- atau sebesar 39%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan jabatan fungsional untuk 7 (lima) orang.

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.788.817.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 880.980.000,00 atau sebesar 49%. *Outcome* dari program ini adalah Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.623.352.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 840.775.000,- atau sebesar 52%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/rutin selama 5 bulan.
- b) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar 14%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan baik APIP dan APEP selama 5 bulan.

- c) Reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.810.000,- atau sebesar 99%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemkab. Serdang Bedagai tahun 2016.
- d) Reviu laporan kinerja SKPD di Lingkungan Pemkab. Serdang Bedagai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.475.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.225.000,- atau sebesar 98%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya reviu laporan kinerja Pemkab. Serdang Bedagai tahun 2016.
- e) Evaluasi SAKIP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.220.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.170.000,- atau sebesar 98%. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD Pemkab. Serdang Bedagai.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas terdapat beberapa Program/kegiatan yang belum dilaksanakan dan sedang dalam proses pelaksanaan sehingga penyerapan dana belum dilakukan yaitu:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  
Pada program ini ada 3 kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya:
  - 1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 3. Alat Tulis Kantor
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Pada program ini ada 3 kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya:
  - 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
  - 3. Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor (JFA)
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Pada program ini ada 2 kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya:
  - 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas

Pada program ini ada 2 kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya :

1. Penyusunan Program/Kegiatan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Operasional SAKIP

5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Pada program ini ada 3 kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya:

1. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
  2. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
  3. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pada program ini ada 5 kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya :

1. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
2. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
3. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
4. Gelar temuan hasil pengawasan
5. Evaluasi RB

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan pelayanan pengawasan reguler terhadap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan rutin oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan terhadap obyek pemeriksaan (obrik) antara lain meliputi :

1. Pelaksanaan Pengawasan internal telah dilaksanakan atas objek pemeriksaan yang terdiri dari :
  - Kecamatan : 17 obrik
  - UPT Dinas Pendidikan : 17 obrik
  - Desa : 237 obrik

- Kelurahan : 6 obrik
- SMP : 37 obrik
- SD : 197 obrik
- Opname Kas : 30 obrik

dari pengawasan yang dilakukan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebanyak 31 LHP

2. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan terhadap:

- a. Temuan BPK
- b. Temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- c. Temuan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 dengan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan beberapa pemeriksaan kasus atas pengaduan-pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun yang mencuat di media massa. Seluruh upaya yang dilakukan diharapkan mampu mendorong akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai secara optimal dalam penegakan hukum yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan merespon dinamika masyarakat serta pengembangan sistem informasi pengawasan yang transparan dan akuntabel. Untuk mendapatkan pelayanan tersebut diatas, masyarakat bisa mengakses website Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai melalui [www.inspektoratsergaikab.net](http://www.inspektoratsergaikab.net) atau melalui email [inspektoratsergaikab@gmail.com](mailto:inspektoratsergaikab@gmail.com).

Berikut data pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang digambarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat**  
**Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian
			2016	2017	2018	2019	Triwulan II Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus yang berindikasikan kerugian Negara/Daerah	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/Daerah	65%	75%	80%	90%	77%
2	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti	65%	75%	80%	90%	65%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindak lanjuti	65%	65%	70%	80%	65%
3	Meningkatnya tertib administrasi barang/aset milik daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Berkurangnya kasus/pengaduan masyarakat	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	50%	75%	85%	95%	63%
6	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang dan terdefinisi			50%	75%	
7	Meningkatnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	50%	65%	75%	85%	65%

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat adalah

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang pengawasan serta luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan;
2. OPD kurang aktif melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Inspektorat dalam penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan.

3. Keterbatasan anggaran pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam pengendalian internal belum optimal
4. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan
5. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan tenaga fungsional auditor dan P2UPD melalui Inpassing baik kepada BPKP Perwakilan Sumatera Utara maupun kepada Menteri Dalam Negeri
2. Mengusulkan penambahan anggaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk optimalisasi:
  - a. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI
  - b. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis
  - c. Peningkatan kapabilitas APIP
4. Membuka kesempatan bagi SKPD maupun masyarakat untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan baik secara langsung maupun melalui web Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD**

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif dalam perubahan renja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai ini mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, yang memuat program serta pagu indikatif dalam perubahan renja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang berisi tentang pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja hasil/keluaran.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.3.1  
Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja  
Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat-surat dinas dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta penyediaan 7 orang tenaga kontrak	1000 eks/9 orang	100.000.000	APBD Kab	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat-surat dinas dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta penyediaan 3 orang tenaga kontrak	1000 eks/3 orang	80.685.000	APBD Kab
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Pembayaran rekening/tagihan alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu ;  belanja telepon belanja faximile belanja internet Speedy	3 rekening	25.000.000	APBD Kab	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Pembayaran rekening/tagihan alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu ;  belanja telepon belanja faximile belanja internet Speedy	3 rekening	3.000.000	APBD Kab
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan kondisi peralatan kantor yang layak pakai yaitu:  Laptop Mesin fotocopy PC Printer	6 jenis  10 unit 1 unit 3 unit 10 unit	45.000.000	APBD Kab	3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan peralatan kantor yang layak pakai yaitu:  Mesin fotocopy PC Printer	3 jenis  1 unit 2 unit 5 unit	3.000.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
4	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Pendingin Ruangan Kulkas Televisi Penyediaan alat tulis kantor yaitu: HVS 70 gr F4 HVS 70 gr A4 HVS 80 gr A3 Pulpen Pensil Penggaris Hekter HD 10 Hekter HD 50 Toner LBP 3000 Toner HP 1100 Catridge HP 2060 Black Catridge HP 2060 Colour Catridge Printer canon Hitam Catridge Printer canon warna Kertas Fax kertas photo Toner Fuji Xerox Toner Konika tinta printer hitam	4 unit 2 unit 2 unit 25 jenis 150 rim 100 rim 5 rim 8 lusin 8 lusin 8 lusin 40 buah 40 buah 16 buah 10 buah 30 buah 24 buah 10 buah 6 buah 10 gulung 30 bungkus 15 buah 10 buah 50 botol	70.000.000	APBD Kab	4	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor yaitu: HVS A4 HVS Folio HVS Kuning Folio Catridge HP 704 b Catridge HP 704 c Toner fuji xerox 105 Continous form uk 9,5 x 5,5 " Continous form uk 9,5 x 11 " Buku Agenda Surat Atom No. 3 Amplob No 90 Amplob No 110 Lem Stick Pen Signo Isi Pen Signo Tinta Printer Brother Box File Calkulator 12 Digit Ring Penjilid Uk Folio	19 jenis 30 rim 75 rim 20 rim 30 bh 20 ktk 15 bh 10 ktk 10 ktk 2 bh 50 ktk 15 ktk 15 ktk 45 bh 48 bh 48 bh 20 btl 3 lusin 10 bh 2 ktk	30.812.500	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
5	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	tinta printer warna anak hektar kecil anak hektar besar ring penjilid amplop no 20 amplop no 110 map biasa map bertulang Penyediannya barang cetakan dan penggandaan surat dinas yaitu: kertas LHP map logo amplop uk. 26x40 amplop kop bupati amplop kop sekda blanko SPPD Blanko Kwitansi kop surat inspektorat kop surat bupati kop surat sekda lembar disposisi	50 butul 10 kotak 10 kotak 4 kotak 30 kotak 30 kotak 500 eks 300 eks 11 jenis 100 rim 500 buah 1000 buah 10 kotak 10 kotak 40 blok 40 blok 20 rim 20 rim 10 rim 30 rim	55.000.000	APBD Kab	5	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Penyediannya barang cetakan dan penggandaan surat dinas yaitu: kertas LHP map logo Cetak DUK kop surat inspektorat kop surat sekda Amplob Inspektorat Amplob Inspektorat Kuning Map Dupak Amplob Bupati Kop Surat Bupati lembar disposisi	11 jenis 30 rim 1000 lbr 1 bh 20 blok 15 blok 10 ktk 1000 lbr 500 lbr 1000 lbr 5 rim 30 blok	20.600.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
6	Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan ruangan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yaitu; lampu kabel stop kontak	3 jenis  20 buah 20 meter 20 buah	12.000.000	APBD Kab	6	Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan ruangan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yaitu; lampu kabel Terminal Kuningan Batre Alkaline uk aa Batre Alkaline uk AAA	5 jenis  10 bh 1 rol 4 bh 10 bh 10 bh	1.795.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor dan 1 Orang Petugas Kebersihan Kantor yaitu; sapu sapu pel karbol sabun mandi sabun cuci piring pengharum ruangan pengharum kamar mandi cermin pembersih kaca keset	10 jenis & 1 tenaga kontrak  20 buah 20 buah 40 botol 10 lusin 40 lusin 120 buah 72 buah 4 buah 48 botol 24 buah	30.000.000	APBD Kab	7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor dan 1 Orang Petugas Kebersihan Kantor yaitu; sapu sapu pel karbol Bros kamar mandi Refil pengharum ruangan	5 jenis  8 bh 4 bh 10 btl 8 bh 12 klg	3.000.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, yaitu;  Buku Peraturan Surat Kabar	2 jenis  30 eks 144 eks	25.000.000	APBD Kab	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, yaitu;  Surat Kabar	1 jenis  120 expl	9.600.000	APBD Kab
9	Penyediaan makanan dan minuman tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	85.000.000	APBD Kab	9	Penyediaan makanan dan minuman tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	30.000.000	APBD Kab
10	Rapat-rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah	20 OP	100.000.000	APBD Kab	10	Rapat-rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	92.200.000	APBD Kab
11	Jasa tenaga administrasi/ teknis	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis	1 orang	25.000.000	APBD Kab	11	Jasa tenaga administrasi/ teknis	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis	2 orang	37.375.000	APBD Kab
12	Operasional Sakip	Tersusunnya Laporan pendukung SAKIP		100.000.000	APBD Kab	12					
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda dua & Roda empat ( 2 R2 + 2 R4 ) yaitu:  Roda 4 Roda 2	2 jenis  2 unit 6 unit	750.000.000	APBD Kab	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional R4 dan R2 secara rutin/berkala yaitu:  Roda 4 Roda 2	2 jenis  5 unit 4 unit	168.700.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
2	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan pendukung Gedung Kantor	1 paket	350.000.000	APBD Kab	2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor secara rutin/berkala yaitu:	2 Paket	94.000.000	APBD Kab
3	Pengadaan mebeleur	Penyediaan Mebeleur	1 paket	120.000.000	APBD Kab			Rehab ringan ruangan Inspektur	1 Paket		
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional R4 dan R2 secara rutin/berkala yaitu: Roda 4 Roda 2	2 jenis  5 unit 4 unit	375.000.000	APBD Kab			Rehab Sedang Kantor Inspektorat	1 Paket		
5	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor secara rutin/berkala yaitu: Pembuatan sekat ruang kantor Pemasangan trafo listrik Pembangunan kamar mandi	3 kegiatan  1 paket 1 paket 1 paket	400.000.000	APBD Kab						
III	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1.480.000.000		III	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			317.750.000	
1	Peningkatan SDM melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Pelaksanaan pelatihan kantor sendiri	12 kali	250.000.000	APBD Kab	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	28.750.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
2	Pendidikan dan pelatihan jabatan struktural (Diklat Pim Tk. IV, III, II)	Pelaksanaan pelatihan diklat kepemimpinan	8 kali	150.000.000	APBD Kab	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kali	195.000.000	APBD Kab
3	Sosialisasi bimbingan teknis dan pelatihan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kab. Serdang bedagai	Pelaksanaan pelatihan kantor sendiri	2 kali	850.000.000	APBD Kab	3	Pelatihan Jabatan Fungsional (Auditor, Pengawas pemerintah dan auditor kepegawaian)	Pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional tertentu	12 org	84.000.000	APBD Kab
4	Pelatihan Jabatan Fungsional (Auditor, Pengawas pemerintah dan auditor kepegawaian)	Pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional tertentu	2 kali	150.000.000	APBD Kab	4	Penilaian Angka Kredit JFA	Penilaian Angka Kredit Untuk PNS Fungsional Auditor	2 kali	10.000.000	APBD Kab
3	Penilaian Angka Kredit JFT	Penilaian Angka Kredit Untuk PNS Fungsional Auditor	2 kali	80.000.000	APBD Kab						



Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100.000.000		IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6.175.000	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	50.000.000	APBD Kab	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	3.175.000	APBD Kab
2	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun	5 laporan	50.000.000	APBD Kab	2	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun	5 laporan	3.000.000	APBD Kab
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas			60.000.000		V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas			4.000.000	
1	Penyusunan Program/Kegiatan dan Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tersusunannya Rencana Kegiatan dan Akuntabilitas	6 laporan	60.000.000	APBD Kab	1	Penyusunan Program/Kegiatan dan Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tersusunannya Rencana Kegiatan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	1 laporan	2.250.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
						2	Operasional Sakip	Terlaksananya SAKIP Inspektorat	5 Laporan	1.750.000	APBD Kab
VI	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					VI	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				
1	Penyusunan program kerja pengawasan tahunan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan program kerja pengawasan tahunan	3 dokumen	15.000.000	APBD Kab	1	Penyusunan program kerja pengawasan tahunan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan program kerja pengawasan tahunan	1 laporan	2.250.000	APBD Kab
2	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	30 SOP	15.000.000	APBD Kab	2	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1 kegiatan	3.490.000	APBD Kab
3	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	30 SOP	15.000.000	APBD Kab	3	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1 kegiatan	3.500.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
VII	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					VI	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/rutin	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala/rutin	12 bulan, 41 PNS & 1 Tenaga kontrak	3.800.000.000	APBD Kab	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/rutin	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala/rutin	1 Tahun	1.923.352.500	APBD Kab
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	Pelaksanaan pemeriksaan kasus pengaduan	1 Tahun	30.000.000	APBD Kab	2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	Pelaksanaan pemeriksaan kasus pengaduan	1 Tahun	50.000.000	APBD Kab
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek di lingk. Pemkab.Sergai	1 Tahun	200.000.000	APBD Kab	3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek di lingk. Pemkab.Sergai	1 Tahun	61.550.000	APBD Kab
4	Penangan kasus pengaduan pada wilayah pemerintah di bawahnya.	Pelaksanaan pemeriksaan kasus pengaduan pada Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	1 Tahun	30.000.000	APBD Kab	4	Penangan kasus pengaduan pada wilayah pemerintah di bawahnya.	Pelaksanaan pemeriksaan kasus pengaduan pada Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	1 Tahun	50.000.000	APBD Kab

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana	No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Urusan Wajib					I	Urusan Wajib				
5	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya evaluasi berkala atas temuan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	1 Tahun	30.000.000	APBD Kab	5	Gelar Temuan Hasil Pengawasan	Pelaksanaan Gelar Temuan Hasil Pengawasan	1 kali	10.275.000	APBD Kab
6	Gelar Temuan Hasil Pengawasan	Pelaksanaan Gelar Temuan Hasil Pengawasan	2 kali	200.000.000	APBD Kab	6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	12 bulan	51.600.000	APBD Kab
7	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	12 bulan	600.000.000	APBD Kab	7	Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Serdang Bedagai	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Serdang Bedagai Tahun 2016	1 Laporan	17.000.000	APBD Kab
8	Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Serdang Bedagai	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Serdang Bedagai Tahun 2015	1 Laporan	40.000.000	APBD Kab	8	Reviu LAKIP SKPD Pemkab. Serdang Bedagai	Pelaksanaan Reviu LAKIP SKPD Pemkab. Serdang Bedagai Tahun 2016	1 Laporan	13.475.000	APBD Kab
9	Reviu LAKIP SKPD Pemkab. Serdang Bedagai	Pelaksanaan Reviu LAKIP SKPD Pemkab. Serdang Bedagai Tahun 2015	1 Laporan	35.000.000	APBD Kab	9	Evaluasi SAKIP	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Evaluasi SAKIP Kabupaten Serdang Bedagai	1 laporan	3.220.000	APBD Kab
10	Tim Evaluasi RB Kabupaten Serdang Bedagai	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Evaluasi RB Kabupaten Serdang Bedagai	2 kegiatan	40.000.000	APBD Kab	10	Evaluasi RB Kabupaten Serdang Bedagai	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Evaluasi RB Kabupaten Serdang Bedagai	1 laporan	2.220.000	APBD Kab
11	Tim Monitoring TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring TPTGR Kabupaten Serdang Bedagai	2 kegiatan	100.000.000	APBD Kab						

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Renja Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan OPD Tahun Anggaran 2017 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Tahun Anggaran 2017.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari OPD dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sei Rampah,

2017

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**H. IFDAL, S.Sos, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670425 198603 1 001**